

**TESIS**

**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI  
DI KECAMATAN BANTAENG, KABUPATEN BANTAENG  
SULAWESI SELATAN**

***SLUM HANDLING STRATEGY BASED ON COMMUNITY  
SOCIAL ECONOMIC CHARACTERISTICS IN THE SLUM  
AREA IN BANTAENG SUB-DISTRICT, BANTAENG  
DISTRICT, SOUTH SULAWESI***

**ANUGRAH BUDIANTO**

**P022191022**



**PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI  
DI KECAMATAN BANTAENG, KABUPATEN BANTAENG  
SULAWESI SELATAN**

***SLUM HANDLING STRATEGY BASED ON COMMUNITY  
SOCIAL ECONOMIC CHARACTERISTICS IN THE SLUM  
AREA IN BANTAENG SUB-DISTRICT, BANTAENG  
DISTRICT, SOUTH SULAWESI***

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi**

**Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ANUGRAH BUDIANTO  
P022191022**

**Kepada**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI  
DI KECAMATAN BANTAENG, KABUPATEN BANTAENG  
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**ANUGRAH BUDIANTO**

**P022191022**

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 30 Juli 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

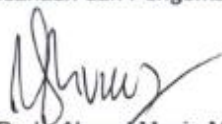


Ir. Ria Wikantari, M. Arch., Ph.D.  
Nip. 196109151988112001



Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si  
Nip. 196604271991032002

Ketua Program Studi,  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng  
Nip. 196207271989031003



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc  
Nip. 19670308 1990031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANUGRAH BUDIANTO

NIM : P022191022

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemilik orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Agustus 2021

menyatakan  
  
ANUGRAH BUDIANTO

## PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala, Tumah yang Maha Esa, atas berkat, rahmatNya sehingga penulis berhasil menyusun tesis dengan judul **“Strategi Penanganan Kawasan Kumuh berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan”**

pada kesempatan ini tak ada hal yang dapat penulis sampaikan selain “Terima Kasih” yang sebesar – besarnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas segala bantuan, bimbingan, kritikan, masukan, nasehat, semangat dan do'a yang senantiasa mengiringi penulis selama masa studi hingga penyusunan tugas akhir. Ucapan ini penulis haturkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Mustakim dan Roslinah, Istri tercinta Ririn Akhriani, serta saudara saya Irmayani, Irmayana, Trisnawari, Nur Annisa dan Rahmawati, yang senantiasa memberikan motivasinya serta doa dalam segala aktifitas yang saya lakukan selama ini.
2. Ibu Ir. Ria Wikantari, M.Arch., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rahmadanih, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, nasehat dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis sehingga tesis dapat terselesaikan.

3. Para dosen penguji, Bapak Prof. Dr. Didi Rukmana, M.S, Bapak DR. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si., Bapak DR. Ir. Arifuddin Akil, M.T yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan kritik yang membangun, juga masukan-masukan yang bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng selaku penasehat akademik program studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, atas segala petunjuk dan bimbingan selama masa studi hingga tahap penyelesaian studi.
5. Pusbindiklatren Bappenas untuk bantuan dana beasiswa Magister, yang merupakan bantuan pendidikan penulis dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di sekolah Pasca Sarjana Unhas.
6. Bapak ibu dosen program studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan semua dosen se Unhas atas segala pengetahuan yang telah diberikan selama masa studi penulis
7. Bapak Ibu staf administrasi Pasca Sarjana Unhas yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis dalam pengurusan berkas akademik selama penulis menimba ilmu di Pasca Sarjana Unhas
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah 2019 ats segala kebersamaan, bantuan, dan perhatiannya selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

9. Bapak Muh. Dimiati Nongpa. M. Pi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam pemberian izin tugas belajar dan seluruh pegawai Bappeda Kab. Bantaeng, terkhusus bidang sekretariat: ibu Sumiati, Ibu Diana Dahlan, yang telah membantu penulis dalam memperoleh bantuan data dan kelengkapan administrasi izin belajar.
10. Seluruh instansi Pemerintah, fasilitator KOTAKU Bantaeng, dan masyarakat di Kawasan Kumuh di kecamatan Bantaeng yang memberikan informasi dan data dalam penyelesaian tesis penulis.
11. Tak terkecuali semua pihak yang telah membantu penulis dalam masa studi hingga penyelesaian tugas akhir ini.

Tesis ini penulis persembahkan kepada Istri tercinta Ririn Akhriani dan Kedua Orang Tua Mustakim dan Roslinah yang memberikan semangat, pengorbanan tanpa henti dan perhatian serta doa tulus yang tiada henti kepada penulis.

Akhir kata, semoga Bapak/Ibu, Saudara/Saudari mendapat balasan yang berlipat ganda di sisiNya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aminn, Aminn Ya Rabbal 'Alamin.

Makassar, 08 Agustus 2021

Anugrah Budianto

## ABSTRAK

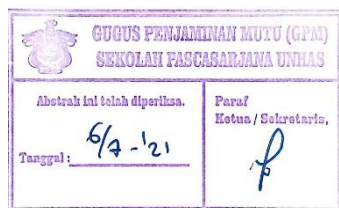
**ANUGRAH BUDIANTO.** *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Ria Wikantari dan Rahmadanih).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat, mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik social dan ekonomi dan merumuskan strategi penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *proportional cluster random sampling*, sedangkan penentuan informan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum karakteristik sosial ekonomi masyarakat di kawasan kumuh tergolong rendah, antara lain tingkat pendidikan yang sebagian besar hanya tamatan SD, bekerja sebagai buruh dan petani, dan pendapatan yang rendah, dengan sebagian tanah ilegal. Namun, beberapa kondisi sosial ekonomi lebih baik karena usia kepala rumah tangga yang masih sangat produktif, kepadatan hunian sesuai standar, terpenuhinya sanitasi dan air, dan kepemilikan bangunan. Hasil analisis klaster, wilayah kumuh di Kecamatan Bantaeng dibagi menjadi tiga klaster. Dan Strategi yang dapat digunakan lebih kearah pemberdayaan dan peningkatan skill masyarakat dan pemberian bantuan baik di bidang usaha kecil maupun pertanian.

Kata kunci: Kawasan Kumuh, Analisis Klaster, Sosial Ekonomi, Strategi





## ABSTRACT

**ANUGRAH BUDIANTO.** *Slum Management Strategy Based on Socio-Economic Characteristics in Bantaeng District, Bantaeng Regency, South Sulawesi (supervised by Ria Wikantari and Rahmadanih).*

This study aims to identify the socio-economic characteristics of the community, classify areas based on social and economic characteristics and formulate strategies for dealing with slum areas on Bantaeng Sub-District.

This study uses a descriptive method using a qualitative approach. The sampling technique used is the proportional cluster random sampling method, while the determination of informants uses purposive sampling.

The results showed that in general the socio-economic characteristics of the people in slum areas were low, including the level of education, most of which only graduated from elementary school, working as laborers and farmers, and low income, with some land being illegal. However, some socioeconomic conditions are better due to the age of the head of the household who is still very productive, the density of occupancy according to standards, the fulfillment of sanitation and water, and the ownership of the building. The results of the cluster analysis show that the slum areas in Bantaeng District are divided into three clusters. And the strategy that can be used is more towards empowering and improving community skills and providing assistance both in the field of small businesses and agriculture.

Keywords: Slums, Cluster Analysis, Socio-Economic, Strategy



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Konsep Wilayah Kumuh .....	17
B. Gambaran Wilayah Kumuh dan Faktor Penyebab Terbentuknya Kawasan Kumuh .....	20
C. Karakteristik Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh .....	25
D. Perencanaan Sosial dan Ekonomi Serta Model Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Kumuh .....	28
E. Analisis <i>Cluster</i> .....	34
F. Arahan Strategi Penanganan .....	36
G. Penelitian Terdahulu .....	38
H. Kerangka Konseptual .....	43
<b>BAB III</b> .....	45
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Rancangan Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46

C.	Sumber Data Penelitian .....	48
1.	Data Primer.....	48
2.	Data Sekunder.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
E.	Populasi, Sampel dan Informan .....	50
F.	Teknik Analisa data.....	54
1.	Identifikasi Sosial Ekonomi kawasan permukiman kumuh.....	54
2.	<i>Cluster</i> kawasan kumuh.....	55
3.	Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	59
G.	Definisi Operasional.....	65
H.	Matriks Penelitian .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>71</b>
A.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	71
1.	Kondisi Geografis .....	71
2.	Kondisi Demografi .....	74
3.	Kondisi Sosial dan Perekonomian .....	76
4.	Kondisi Fisik Kawasan Kumuh Di Kecamatan Bantaeng.....	77
B.	ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PADA KAWASAN KUMUH .....	84
C.	<i>CLUSTER</i> KAWASAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI.....	112
D.	STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH.....	119
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>152</b>
A.	Kesimpulan .....	152
B.	Keterbatasan Penelitian.....	153
C.	Saran .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>155</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>162</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan Penggunaan Lahan di Kecamatan Bantaeng (Sumber RPLP 2018).....	7
Gambar 2. Grafik Perbandingan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Bantaeng berdasarkan SK Bupati Tahun 2014 dan 2019.....	8
Gambar 3 . Perbandingan wilayah kumuh di Kabupaten Bantaeng.....	9
Gambar 4. Proses terbentuknya wilayah kumuh (UN-HABITAT, 2003)...	18
Gambar 5 Skema Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh (Sumber PermenPUPR, Tahun 2018) .....	24
Gambar 6. Peta Wilayah Kumuh Kecamatan Bantaeng berdasarkan SK Bupati Tahun 2019 (Sumber KOTAKU) .....	47
Gambar 7. Ilustrasi Algoritma Hierarcical clustering .....	56
Gambar 8. Diagram dasar SWOT.....	60
Gambar 9. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bantaeng, Sumber : RPJMD Kab. Bantaeng.....	72
Gambar 10. Persentase Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten .....	73
Gambar 11. Grafik rentang usia Kepala Keluarga kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	86
Gambar 12. Grafik tingkat pendidikan kepala keluarga pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	89
Gambar 13. Grafik perbandingan tingkat pendidikan antar kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng .....	90

Gambar 14. Grafik perbandingan kepadatan hunian tiap kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	92
Gambar 15. Perbandingan sumber air penduduk antar kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng .....	96
Gambar 16. Perbandingan penggunaan fasilitas sanitasi antar kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng .....	99
Gambar 17. Grafik perbandingan aksesibilitas kerja penduduk antar kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng (satuan jiwa).....	101
Gambar 18. Grafik perbandingan bidang pekerjaan setiap kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng (Satuan Jiwa).....	103
Gambar 19. Perbandingan pekerjaan sektor jasa pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng .....	103
Gambar 20. Grafik perbandingan besaran penghasilan penduduk antar kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng (satuan jiwa).....	106
Gambar 21. Grafik perbandingan legalitas lahan pada kawasan kumuh (satuan unit).....	109
Gambar 22. Grafik perbandingan status bangunan penduduk antar kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng (satuan unit) .....	112
Gambar 23. Dendogram hasil pengolahan data .....	116
Gambar 24. Diagram matriks swot kawasan kumuh kecamatan Bantaeng .....	130

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peneliti Terdahulu .....	41
Tabel 2. Jumlah sampel perkawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng....	52
Tabel 3. Rincian Indikator Sosial dan Ekonomi.....	55
Tabel 4. Skoring variabel yang digunakan dalam analisis Cluster .....	57
Tabel 5. Matriks IFAS dan EFAS .....	63
Tabel 6. Skala Perbandingan Berpasangan .....	64
Tabel 7. Matriks Penelitian.....	68
Tabel 8. Luas Wilayah administrasi per Desa/Kelurahan di Kecamatan..	73
Tabel 9. Kondisi pertumbuhan penduduk di kecamatan Bantaeng periode 2017-2018.....	75
Tabel 10. Perbandingan Jumlah Sekolah pada Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantaeng.....	76
Tabel 11. Lokasi Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Bantaeng (SK Tahun 2019).....	78
Tabel 12. Jumlah Bangunan dalam Wilayah kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	79
Tabel 13. Kondisi Jalan Wilayah Kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	80
Tabel 14. Perbandingan Kondisi Drainase tiap Wilayah Lokasi Kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	81
Tabel 15. Perbandingan Kondisi Persampahan tiap Wilayah Lokasi Kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	82

Tabel 16. Perbandingan Kondisi Proteksi Kebakaran tiap Wilayah Lokasi Kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	84
Tabel 17. Rentang usia Kepala Keluarga kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bantaeng.....	85
Tabel 18. Tingkat pendidikan kepala keluarga pada kawasan permukiman kumuh .....	88
Tabel 19. Tingkat kepadatan hunian rumah penduduk kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	91
Tabel 20. Jenis Sumber air rumah penduduk pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	93
Tabel 21. Jenis Fasilitas sanitasi penduduk pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	97
Tabel 22. Akses lapangan kerja penduduk kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	99
Tabel 23. Jenis bidang pekerjaan penduduk pada kawasan kumuh di kecamatan Bantaeng .....	101
Tabel 24. Perbandingan besaran penghasilan penduduk pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng .....	105
Tabel 25. Status lahan penduduk pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	107
Tabel 26. Status Bangunan penduduk pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng.....	110

Tabel 27. Hasil identifikasi karakteristik sosial ekonomi tiap kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng .....	113
Tabel 28. Jarak Euclidian antar kawasan kumuh.....	114
Tabel 29. Cluster Membership yang terbentuk hasil pengolahan data ..	115
Tabel 30. Nilai rata-rata tiap cluster berdasarkan karakteristik kawasan	117
Tabel 31. Pembobotan dan skoring faktor internal.....	127
Tabel 32. Pembobotan dan skoring faktor eksternal.....	128
Tabel 33. Matriks SWOT kawasan kumuh Kecamatan Bantaeng.....	139
Tabel 34. Hasil Perhitungan Pairwise Comparison alternatif strategi Weaknesses-Opportunities .....	145



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar di dunia. Namun sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya penumpukan penduduk di suatu wilayah atau daerah. Salah satu penyebab terjadinya sebaran penduduk yang tidak merata adalah adanya kesenjangan perekonomian yang begitu besar antar wilayah dan kesenjangan antara perekonomian di desa sebagai petani dan di pusat-pusat kota di berbagai daerah, menyebabkan banyaknya penduduk yang tinggal di desa melakukan urbanisasi ke kota. Berdasarkan sensus penduduk yang diadakan pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 210 juta jiwa, suatu jumlah yang cukup besar. Hampir 50% penduduk tersebut tinggal di kawasan perkotaan. (Patrisia, 2017)

Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang memiliki masalah permukiman yang sangat kompleks dibanding dengan kota di negara maju, karena karakteristik penduduk serta latar belakang sosial dan ekonomi kota-kota di negara berkembang berbeda dengan kota-kota yang sudah maju. Di Indonesia sendiri secara umum urbanisasi adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban

untuk mencari pekerjaan. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban crime dan masih banyak masalah lain. Di desa juga akan timbul masalah diantaranya yakni berkurangnya sumber daya manusia karena penduduknya telah pergi ke kota, desa akhirnya tidak mengalami perkembangan yang nyata. (Harahap, 2013)

Urbanisasi yang dilakukan penduduk desa ke kota menyebabkan terjadinya penumpukan penduduk di kota dengan harapan terjadinya perbaikan perekonomian menyebabkan urbanisasi terus terjadi. Namun, kurangnya skill dan Pendidikan dari penduduk desa menyebabkan mereka kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mereka tidak mampu untuk memiliki kehidupan yang layak. Salah satu bentuk akibat dari bertambahnya jumlah penduduk di kota adalah terbentuknya pemukiman kumuh. (Pigawati & Nursyahbani, 2015)

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. (UU No. 1 Tahun 2011)

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup kompleks, baik dari sisi fisik/lingkungan, ekonomi, sosial, serta sarana dan prasarananya. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Program Sustainable Development Goals (SDG's) tahun 2019 dan tertuang dalam RPJMN tahun 2014-2019 telah menargetkan bahwa setiap kota dan daerah di Indonesia telah terbebas dari permukiman kumuh. Tetapi sampai saat ini tujuan dari program RPJMN belum tercapai. Determinan Faktor dalam konteks penanganan kawasan permukiman kumuh sangat signifikan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam prosesnya kemudian berdampak pada kondisi kawasan perkotaan secara umum dan diidentifikasi akan memerlukan penanganan dari waktu ke waktu secara berkelanjutan.

Perkembangan permukiman kumuh perkotaan secara khusus telah berdampak terhadap paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Pada sisi yang lain khususnya terkait dengan tatanan sosial budaya masyarakat, dan komunitas yang bermukim pada lingkungan permukiman kumuh, mengindikasikan bahwa secara ekonomi termasuk kategori masyarakat ekonomi lemah dan berpenghasilan rendah, yang merekondisi penyebab terjadinya degradasi tatanan kehidupan masyarakat, baik pada tingkat struktur sosial, sistem sosial, dinamika sosial,

pola kultural, konflik sosial dan fenomena urban crime. (RP2KPKP Kab. Bantaeng, 2017)

Penataan kawasan kumuh di kawasan perkotaan dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah terkait pemahaman standar permukiman yang layak baik dari aspek fisik maupun aspek sosial. Salah satu aspek terkait aspek sosial yang berhasil diidentifikasi Balai Litbang Sosial Ekonomi Bidang Permukiman (Tim Peneliti, 2010) adalah terkait dengan: belum optimalnya peran, kapasitas institusi dan pengelolaan dari pemerintah (kota) serta masyarakat terkait program penataan kawasan kumuh. Komunikasi pemerintah (kota) - masyarakat belum terlembaga dengan baik struktur dan fungsinya. belum jelasnya konsep dan strategi implementasi program dari masing-masing dinas dan swasta terkait penataan kawasan kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup kompleks, baik dari sisi fisik/lingkungan, ekonomi, sosial, serta sarana dan prasarananya. Determinan Faktor dalam konteks penanganan kawasan permukiman kumuh sangat signifikan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik (RP2KPKP Kab. Bantaeng). Adapun factor sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola

kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. (CiptakaryaPU, 2016)

Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa tatanan sosial budaya masyarakat, dan komunitas yang bermukim pada lingkungan permukiman kumuh, secara ekonomi termasuk kategori masyarakat ekonomi lemah dan berpenghasilan rendah, yang merekondisi penyebab terjadinya degradasi tatanan kehidupan masyarakat, baik pada tingkat struktur sosial, sistem sosial, dinamika sosial, pola kultural, konflik sosial dan fenomena *urban crime* (RP2KPKP Kab. Bantaeng).

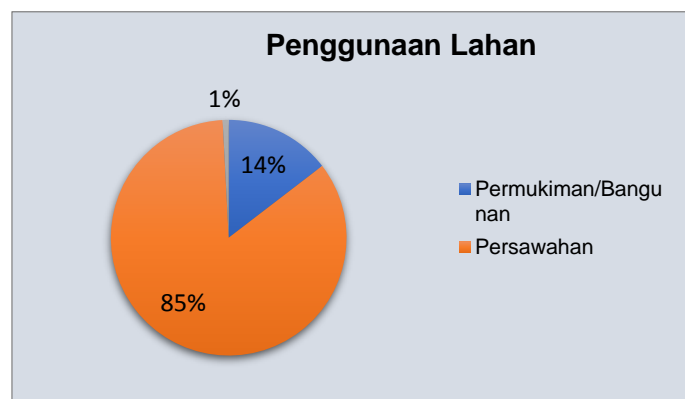
Penanganan permukiman kumuh baik dengan peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan kondisi sosial dan ekonomi antara kawasan yang satu dengan yang lain diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik pada masing-masing kawasan. Ada begitu banyak analisis yang didorong oleh pendekatan akan kebutuhan dasar, pendekatan kapabilitas dan pendekatan inklusi sosial. (Roy et al., 2020). Salah satu pendekatan untuk memberikan gambaran permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkan kawasan berdasarkan kesamaan karakteristik kawasan kumuh tersebut. Pengelompokkan kawasan tersebut dapat dilakukan menggunakan *Analisis Cluster*. *Analisis cluster* merupakan analisis yang digunakan untuk mengelompokkan pengamatan atau variabel menjadi beberapa kelompok pengamatan atau variabel yang jumlahnya lebih sedikit. *Analisis cluster* dilakukan jika peneliti belum mengetahui jumlah kelompok baru. *Analisis cluster* bertujuan untuk mengelompokkan n

objek berdasarkan  $p$  variat yang memiliki kesamaan karakteristik diantara objek-objek tersebut. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih *cluster* (kelompok) sehingga objek-objek yang berada dalam satu *cluster* akan mempunyai kemiripan atau kesamaan karakter. (Yulianto & Hidayatullah, 2014)

Analisis *cluster* saat ini semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang melahirkan data besar (big data). Banyak metode *cluster* yang telah dikembangkan oleh para pakar dan telah banyak pula diterapkan pada berbagai bidang. (PUTRI et al., 2019). Berkembangnya metode *cluster* hingga saat ini disebabkan oleh banyaknya bidang kehidupan yang membutuhkan analisis *cluster* untuk pengelompokan objek. Pengelompokan ini menghasilkan Informasi yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan (Suhaeni & Kurnia, 2018) , dalam hal ini penentuan prioritas wilayah penanganan kawasan permukiman kumuh.

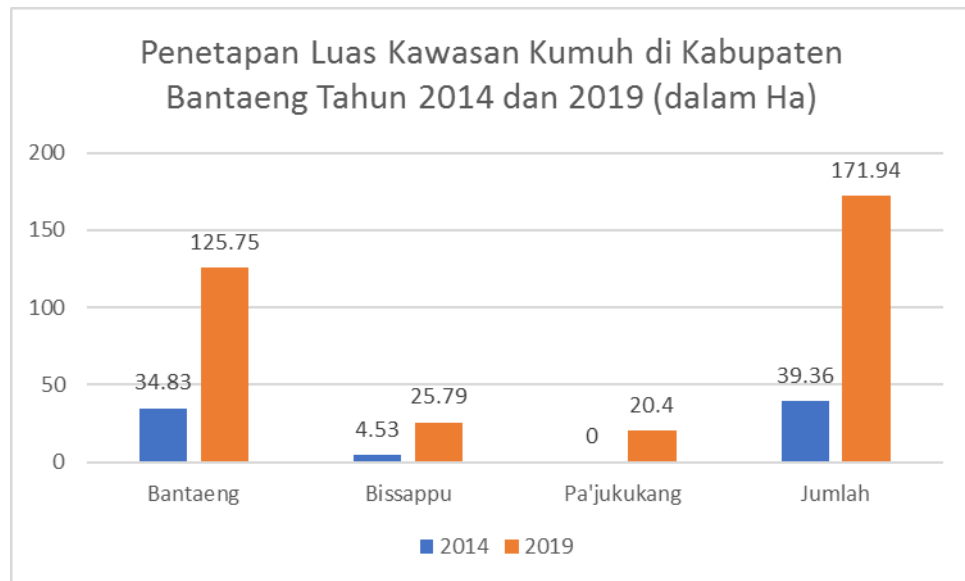
Bantaeng yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi selatan juga tak luput dari permasalahan permukiman kumuh. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng menunjukkan luasan wilayah Kabupaten Bantaeng sebesar 395,8 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 0,9% dari wilayah Sulawesi Selatan. Kecamatan Bantaeng sendiri memiliki luasan 28,85 Km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 7,29 % dari luas Kabupaten. Sedangkan luas persawahan di Kecamatan Bantaeng 20,6 Km<sup>2</sup> atau sekitar 71% dari luas wilayah Kecamatan Bantaeng. Sedangkan luas wilayah permukiman hanya

sekitar 15% dari total luas wilayah Kecamatan. Hal ini menyebabkan harga tanah yang ada di Kabupaten Bantaeng sangat tinggi sehingga membuat sebagian masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Kecamatan Bantaeng tidak mampu memiliki tanah ataupun lokasi perumahan yang layak. Fenomena permukiman kumuh hakekatnya merupakan salah satu cara masyarakat miskin mengatasi persoalan pemukiman yang terjangkau di tengah mahalnnya lahan di perkotaan dan keterkaitan yang tinggi dengan mata pencaharian. Warga perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan terpaksa tinggal di pemukiman kumuh ini sembari mencoba mengubah nasibnya. (Rahman Nugroho et al., 2017)



Gambar 1. Penggunaan Lahan di Kecamatan Bantaeng (Sumber RPLP 2018)

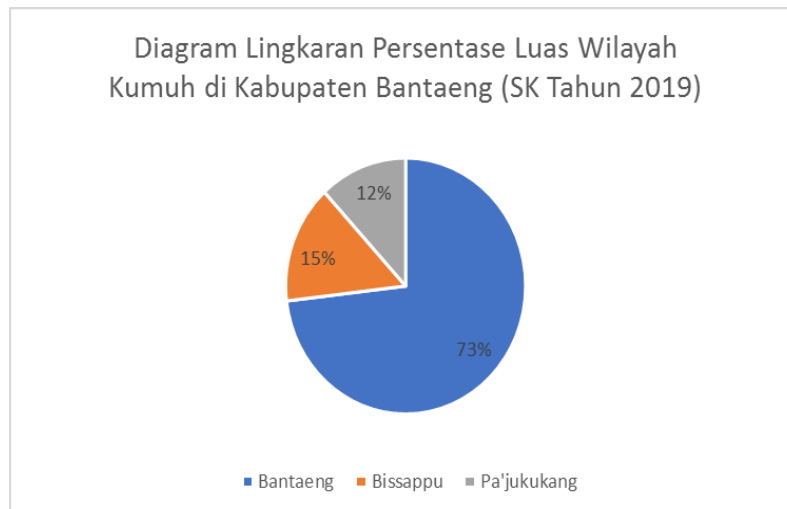
Berdasarkan surat keputusan bupati nomor 293 tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bantaeng, menetapkan luasan daerah yang termasuk dalam Kawasan kumuh adalah sebesar 39,36 Hektar. Dan luasan wilayah kumuh pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Tahun 2019 seluas 171,94 Hektar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya lonjakan luasan wilayah kumuh sebesar 132, 58 Hektar dalam rentang waktu 2014 – 2019.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Bantaeng berdasarkan SK Bupati Tahun 2014 dan 2019

Kecamatan Bantaeng merupakan Ibu kota Kabupaten Bantaeng dengan peningkatan luas wilayah kumuh paling besar dalam rentang waktu tahun 2014 – 2019 yakni sebesar 90,92 Ha. Adapun karakteristik wilayah kumuh di Kecamatan Bantaeng sesuai dengan SK Bupati, berdasarkan lokasi yakni pada Kawasan Kumuh tepi sungai, Kawasan Kumuh tengah kota dan Kawasan kumuh pesisir Pantai. Adapun Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Pa'jukukang hanya pada daerah pesisir pantai. Jika membandingkan luasan wilayah kumuh di Kabupaten Bantaeng, maka Kecamatan Bantaeng memiliki persentase luasan wilayah kumuh sebesar 73%. Adapun Bissappu sebesar 15% dan Pa'jukukang sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kumuh di Kabupaten Bantaeng terkonsentrasi pada Kecamatan Bantaeng dengan berbagai tipologi wilayah kumuh yang ada.





Gambar 3 . Wilayah kumuh di Kabupaten Bantaeng

Kawasan permukiman di Kecamatan Bantaeng sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi Sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat di Kecamatan Bantaeng khususnya di kawasan permukiman kumuh terjadi pada pola pengelompokan sosial, dimana pada umumnya masyarakat beretnis Makassar dengan kebiasaan hidupnya yang berkelompok dan berkumpul pada sebuah lingkungan kecil sehingga terbawa dan teraplikasikan dalam kondisi bermasyarakat saat ini, sehingga memunculkan lingkungan permukiman yang padat yang tidak jelas batas antar satu rumah dengan rumah lainnya. (RPLP, 2018)

Sedangkan dari segi ekonomi, secara umum mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Bantaeng adalah bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini disebabkan lokasi geografis dari kecamatan Bantaeng yang merupakan ibu kota Kabupaten Bantaeng, sehingga terdapat banyak toko dan usaha perdagangan lainnya. Selebihnya adalah

di bidang kelautan dan perikanan. sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan potensi laut yang melimpah karena sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng berada di pesisir pantai sehingga warga yang tinggal di pesisir pantai memilih membudidayakan rumput laut sebagai mata pencaharian mereka. (RPLP, 2018). Menurut (Putri et al., 2018) ada perbedaan yang nyata tingkat kekumuhan antara wilayah pesisir dan wilayah non pesisir dimana wilayah pesisir rata-rata tingkat kekumuhannya lebih tinggi daripada wilayah non pesisir dimana secara signifikan yang berpengaruh besar meningkatkan tingkat kekumuhan adalah tingkat kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, legalitas tanah dan pelayanan air bersih serta ruang terbuka.

Dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tahun 2018, disebutkan bahwa ada beberapa isu-isu kekumuhan yang menjadi sorotan di kecamatan Bantaeng, diantaranya: a) Tidak adanya pengetahuan masyarakat terkait aturan pendirian bangunan dan kondisi lahan yang tidak memiliki akses jalan, b) Belum adanya kemampuan finansial untuk memperbaiki atap, lantai dan dinding bangunannya karena lebih mendahulukan kebutuhan primer, merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ada beberapa yang bukan pemilik lahan (sewa atau numpang), c) Belum adanya kemampuan finansial untuk pemasangan pipa PDAM pribadi terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), d) Belum adanya kemampuan finansial untuk

pembangunan jamban dan septiktank karena merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), limbah rumah tangga tidak terintegrasi dengan saluran drainase, dan e) Kurangnya pemeliharaan dan kesadaran dari masyarakat sekitar terkait sampah.

Terkait dengan isu-isu kekumuhan diatas, Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam RPJMD Kab. Bantaeng Tahun 2019-2023 merumuskan salah satu program yang dilaksanakan adalah program pengentasan Kawasan kumuh di desa/Kelurahan. Sayangnya program penanganan Kawasan kumuh hanya terpusat pada satu Dinas dan dalam 1 program kegiatan yang focus dalam penanganan infrastrukturnya saja. Padahal menurut Lestari (2013) Munculnya permukiman kumuh tersebut karena faktor rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin. Kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sehingga lingkungan menjadi semakin kotor dan tidak terawat. Hal ini menjadi salah satu dasar bahwa penanganan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi menjadi sangat penting dilakukan guna mengatasi wilayah kumuh yang sudah ada.

Berdasarkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bantaeng (RP2KPKP) bahwa target SDG's di tahun 2019 adalah bebas dari Kawasan Kumuh. Namun berdasarkan data SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng menunjukkan adanya tren peningkatan luasan wilayah kumuh di daerah Bantaeng. Sedangkan data Rencana Penataan Lingkungan

Permukiman (RPLP) Kecamatan Bantaeng menunjukkan bahwa secara ekonomi masyarakat pada Kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan memiliki akses yang minim terhadap sarana pengembangan ekonomi lokal. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian juga menjadi permasalahan masyarakat Kawasan permukiman kumuh di wilayah Kecamatan Bantaeng. Adanya basis data informasi karakteristik sosial ekonomi pemukim sehingga memberi arahan yang lebih jelas dan rinci atas urutan prioritas program-program pemberdayaan yang tepat sebagai bagian upaya penanganan Kawasan kumuh permukiman kumuh perkotaan (Rahman Nugroho et al., 2017).

Pembagian tipologi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bantaeng telah dilakukan berdasarkan kondisi geografis kawasan (SK Bupati Bantaeng Tahun 2014) yang dibagi menjadi 4 (empat) tipologi, yakni kumuh tepian air (Pantai dan Sungai), kumuh tepian sungai, kumuh pinggiran kota, dan kumuh tepian pantai. Adapun pembagian kawasan berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat kawasan kumuh belum dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukannya suatu penelitian untuk memberikan gambaran kondisi dan pembagian *cluster* kawasan berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi dari kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng. Serta penanganan kawasan kumuh dengan pendekatan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kondisi dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat dan pembagian *cluster* di kawasan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Bantaeng. Penelitian ini bermaksud memberikan arahan penanganan berdasarkan kondisi dan karakteristik sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi salah satu opsi dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantaeng, khususnya di Kecamatan Bantaeng.

## **B. Rumusan Masalah**

Penanganan kawasan kumuh dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan berdampak pada aspek keberlanjutan (*sustainability*), dimana ketika aspek sosial dan ekonomi masyarakat dapat meningkat maka tingkat kemandirian masyarakat dalam kehidupan sosialnya juga akan meningkat (Kustiwan & Ramadhan, 2019). Pemerintah Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan pemerintah Pusat telah melakukan berbagai cara dalam pengentasan kawasan kemiskinan, mulai dari Program langsung penanganan sarana dan prasarana wilayah kawasan kumuh (PNPM, KOTAKU) hingga bantuan sosial, namun belum betul-betul efektif dalam menangani kawasan permukiman kumuh. Kurangnya data dan informasi mengenai kondisi sesungguhnya dan prioritas kebutuhan masyarakat membuat beberapa program dan kebijakan tidak begitu efektif. Serta penyamarataan penerapan program dan kebijakan membuat kegiatan tersebut hanya efektif di beberapa tempat dan menjadi tidak efektif pada tempat yang lainnya. Sehingga berdasarkan latar

belakang penelitian di atas, perlu adanya suatu kajian berfokus dalam melihat karakteristik sosial ekonomi masyarakat dan memberikan solusi alternatif dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bantaeng yang masih berfokus pada aspek fisik sarana dan prasarana dianggap kurang efektif dalam mencegah terjadinya peningkatan luasan kawasan kumuh, sehingga perlu adanya alternatif strategi lain dalam mencegah dan menangani kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Bantaeng?
2. Bagaimana *cluster* permukiman kumuh berdasarkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh di Kecamatan Bantaeng?
3. Apa strategi penanganan permukiman kumuh karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Bantaeng?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat di kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng
2. Untuk menganalisis kluster wilayah kumuh berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh di Kecamatan Bantaeng

3. Merumuskan strategi penanganan kawasan kumuh berdasarkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat pada kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi:

1. Kegunaan teoritis dalam ranah akademik pengembangan ilmu Perencanaan Pengembangan Wilayah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam memahami karakteristik masyarakat yang berada pada kawasan kumuh.
2. Kegunaan bagi profesi perencanaan dan pembuat kebijakan, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan perencanaan pengembangan wilayah di bidang manajemen perencanaan terutama dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh ataupun alternatif solusi dalam menangani persoalan pada kawasan kumuh.
3. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini, focus kepada karakteristik sosial ekonomi permukiman kumuh di Kecamatan Bantaeng yang terletak pada 6 lokasi

wilayah kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantaeng serta fokus pada rencana penanganan kawasan permukiman kumuh.



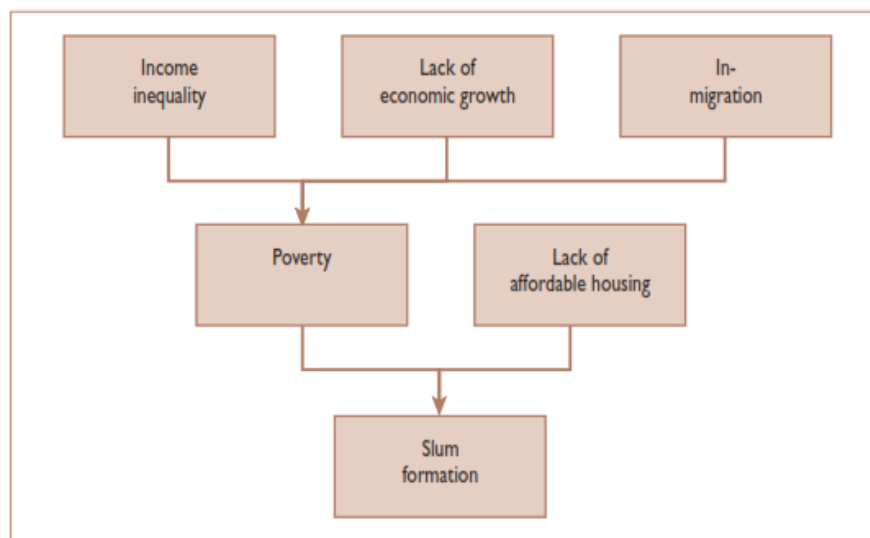
## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Wilayah Kumuh**

Kata 'kumuh' memiliki makna yang tidak tepat. Walaupun ada definisi PBB yang resmi dan agak tidak berperasaan tentang daerah kumuh, yang merujuk pada daerah yang mirip perkotaan yang ditandai dengan perumahan di bawah standar dan 'kemelaratan' di mana penduduknya tidak memiliki kepastian tenurial, kata tersebut memunculkan jauh lebih banyak gambaran yang mengganggu. dan imajinasi yang telah tumbuh akibat dampak dari proyek-proyek besar selama tiga abad terakhir: industrialisasi, urbanisasi, dan kapitalisme. Perkampungan kumuh tentu saja merupakan realitas fisik, yang tampaknya tidak direncanakan dan tidak terorganisir, informal dan memiliki kekurangan dalam akses layanan dasar. Hal ini dipandang sebagai kebalikan dari masyarakat tertata. (Frenzel Dkk, 2017)

Istilah 'kumuh' dalam konteks umum digunakan untuk menggambarkan berbagai pemukiman berpenghasilan rendah dan / atau kondisi kehidupan manusia yang buruk. Kondisi perumahan yang tidak memadai ini, mencontohkan beragam manifestasi kemiskinan sebagaimana didefinisikan dalam Program Aksi yang diadopsi pada KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial. Definisi istilah 'kumuh' mencakup arti tradisional - yaitu, area perumahan yang dulunya cukup baik atau bahkan diinginkan, tetapi menjadi buruk karena penduduk asli telah pindah ke

daerah kota yang baru dan lebih baik. Kondisi rumah-rumah tua itu kemudian menurun, dan unit-unitnya secara bertahap dibagi dan disewakan kepada kelompok-kelompok berpenghasilan rendah. Contoh khas adalah daerah kumuh dalam banyak kota seperti kota di negara maju dan negara berkembang. (UN-HABITAT, 2003)



Gambar 4. Proses terbentuknya wilayah kumuh (UN-HABITAT, 2003)

Dalam peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (Kementerian PUPR, 2016)

Kumuh merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, budaya, dan lokasinya sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota. Permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas, dimana permukiman kumuh banyak berkembang di perkotaan baik kota kecil maupun kota besar, dengan direncanakan ataupun tidak direncanakan. (Andriana & Manaf, 2017)

Dijelaskan oleh Adriasih (2004) dalam Rahayu dan Rutiana (2007), Permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang secara fisik mempunyai ciri seperti kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin, hujan, lingkungan dan tata permukiman tidak teraktur, bangunan sementara, acak-acakan tanpa perencanaan, prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), umumnya mata pencaharian penghuninya tidak tetap dan usahanya non- formal, tanah bukan milik penghuni, pendidikan rendah, penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat (pendatang dari luar daerah), rawan banjir dan kebakaran, serta rawan terhadap timbulnya penyakit. (Fitriyani, 2012)

Andini (2013) dalam (Heston & Yusuf A, 2013) mengemukakan bahwa Daerah kumuh adalah daerah di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di daerah tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik

standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam (Rahman Nugroho et al., 2017) Permukiman kumuh adalah wilayah permukiman dengan bangunan yang padat dan tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang buruk dan padat penduduk. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan tempat tinggal), misalnya: bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (laying), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat 2. Banyak rumah yang tidak layak huni 3. Sanitasi lingkungan buruk

## **B. Gambaran Wilayah Kumuh dan Faktor Penyebab Terbentuknya**

### **Kawasan Kumuh**

Konsep "kumuh" dapat digambarkan sebagai sebuah unit rumah yang memiliki minimal lima hingga sepuluh rumah tangga atau unit terkecil yang memiliki setidaknya 25 anggota. Hal ini umumnya merupakan tempat tinggal yang rentan yang berkembang pada lahan milik negara, dan properti pribadi yang kosong, sekumpulan kamar/bilik dengan tingkat konsentrasi penduduk yang lebih tinggi, layanan utilitas yang tidak memadai, terutama air dan sanitasi, posisi sosial ekonomi

yang lebih rendah dari mayoritas penduduk, ancaman atau tidak adanya jaminan kepemilikan. (Hossain & Naimul Wadood, 2020)

Johan Silas, seorang pakar dalam bidang arsitektur dan permukiman kumuh, menjelaskan bahwasanya kriteria pokok untuk menentukan permukiman kumuh/marjinal adalah: bila berada di lokasi yang ilegal, dengan keadaan fisiknya yang sub standar; penghasilan penghuni amat rendah (miskin), tidak terlayani oleh berbagai fasilitas kota; dan tidak diingini kehadirannya oleh publik (kecuali yang berkepentingan). Berdasarkan kriteria Silas tersebut, aspek legalitas juga merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kekumuhan suatu wilayah selain buruknya kondisi kualitas lingkungan yang ada. (Hartini, 2019)

Dari perspektif sinoptik, daerah kota yang miskin menunjukkan ekspresi fisiknya dalam berbagai cara yang biasanya tidak mengikuti konsep yang ketat dan universal. Namun, beberapa bentuk kemiskinan perkotaan khususnya dapat secara langsung dikaitkan dengan morfologi lingkungan binaan. Secara umum, pengaturan bangunan yang tidak teratur dikaitkan dengan daerah kumuh, serta ketinggian bangunan rendah, bahan konstruksi yang buruk, dan kepadatan bangunan yang umumnya tinggi dan berada di daerah yang sering terancam bahaya. (Wurm et al., 2017)

Badan Pusat Statistik kemudian melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (2013) dimana mengkriterikan daerah kumuh dengan indicator:

- a. Rumah Tangga tidak memiliki akses air minum
- b. Rumah Tangga tidak memiliki akses sanitasi
- c. Luas Minimal Lantai Hunian perkapita
- d. Daya tahan material hunian

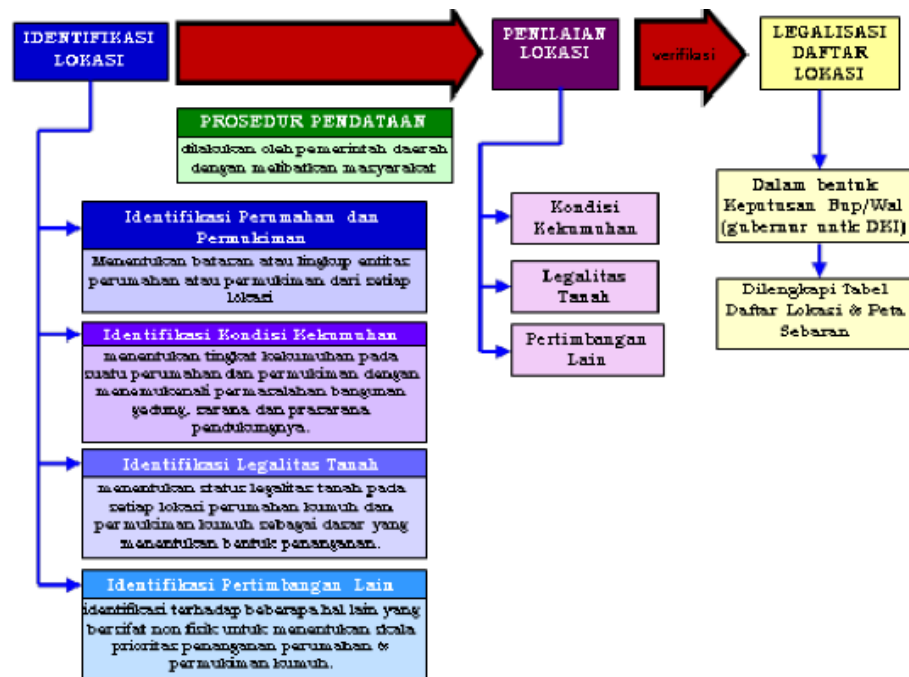
Karakteristik permukiman kumuh menurut Suparlan (2001) dalam (Handayani et al., 2007) :

- a. Fasilitas umum kurang atau tidak memadai dan konstruksi bangunan tidak permanen serta tidak dilengkapi sarana dan prasarana dasar seperti fasilitas untuk mandi, cuci dan kakus (MCK).
- b. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan atau volume penggunaan ruang- ruang yang tinggi serta adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- c. Merupakan satuan komunitas tunggal yang hidup tersendiri dengan batas- batas kebudayaan dan sosial yang jelas, secara administratif dapat merupakan bagian dari sebuah RT atau RW atau bahkan sebuah kelurahan.

- d. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.
- e. Rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Luas lantai per kapita di kota kurang dari 4 m<sup>2</sup> sedangkan di desa kurang dari 10 m<sup>2</sup>.

Kriteria perumahan kumuh berdasarkan (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.22 Tahun 2018, 2018*) dapat ditinjau dari :

- a. Bangunan Gedung
- b. Jalan Lingkungan
- c. Penyediaan air minum
- d. Drainase lingkungan
- e. Pengelolaan air limbah
- f. Pengelolaan persampahan
- g. Proteksi kebakaran



Gambar 5 Skema Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh (Sumber PermenPUPR, Tahun 2018)

Menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (Hutapea, 2012 dalam (Wiarni et al., 2018)) penyebab adanya permukiman kumuh adalah:

1. Karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.
2. Karakter lingkungan yaitu tidak ada open space (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi, sarana prasarana yang tidak terencana

Menurut (Hanifah & Widiyastuti, 2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekumuhan yang terjadi antara lain:

1. Jarak lokasi permukiman dekat dengan pusat kota



2. Kemampuan ekonomi masyarakat tergolong rendah
3. Pola hidup masyarakat kurang sadar terhadap lingkungan
4. Wilayah permukiman memiliki kerentanan adanya bencana banjir rob dan penurunan tanah
5. Kurangnya perhatian dari pemerintah

### **C. Karakteristik Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh**

Perkotaan sangat penting secara politis, sosial, budaya dan ekonomi di berbagai negara tempat mereka berada. Perumahan adalah salah satu penentu utama morfologi kota-kota ini. Perumahan sebagai unit lingkungan memiliki pengaruh besar pada kesehatan, efisiensi, perilaku sosial, kepuasan dan kesejahteraan umum masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial dan ekonomi dari suatu masyarakat, karena merupakan bukti fisik dan historis terbaik dari peradaban suatu negara. (Ogunleye, 2013)

Lustokin dan Burchil (2007) dalam (Ogunleye, 2013) menjelaskan bahwa Perumahan adalah struktur permanen untuk tempat tinggal manusia, dan telah menjadi komponen penting dalam jalinan sosial, ekonomi dan kesehatan setiap negara. Dengan demikian sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik manusia.

Indikator sosial mewakili status aktual masyarakat. Mereka menunjukkan kualitas hidup suatu masyarakat. Tingkat standar kehidupan sosial penghuni daerah kumuh pada umumnya buruk. Penghuni kawasan

kumuh menghadapi masalah yang bermasalah dalam skenario yang terjadi saat ini seperti - wilayah sempit dengan populasi yang padat, kondisi tempat tinggal sempit yang tidak dibangun dengan baik, lingkungan yang tidak higienis biasanya dengan infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya fasilitas sanitasi dan air minum dll (Nath Singh, 2016)

Kondisi kehidupan sebagian besar penduduk daerah kumuh sangat menyedihkan, dengan tingkat kekurangan gizi yang tinggi, penyakit menular, dan kekerasan. Dengan kata lain merujuk pada area informal yang menderita masalah aksesibilitas, jalan sempit, tidak adanya lahan kosong dan ruang terbuka, kepadatan hunian yang sangat tinggi, dan infrastruktur dan layanan yang tidak mencukupi. (Bagheri, 2013)

Permukiman kumuh di negara berkembang tidak memiliki layanan sanitasi dasar karena aksesibilitas yang buruk, kurangnya status hukum dan sumber daya keuangan serta kurangnya infrastruktur yang mendukung. Selain itu, Kurangnya fasilitas dan sumber daya ekonomi untuk membuka lapangan kerja yang produktif bagi kaum muda tidak hanya membantu meningkatkan tren kemiskinan tetapi juga meningkatkan bahaya sosial seperti kecanduan narkoba di kalangan kaum muda. Dan dari sudut pandang nutrisi, orang-orang tidak mengalami pola makan yang cocok sehubungan dengan akses akan makanan dan vitamin yang kaya protein. (Bagheri, 2013)

Secara umum status sosial penduduk daerah kumuh sangat buruk. Mereka termasuk rumah tangga miskin, kurangnya fasilitas dasar seperti air

minum, penerangan, listrik, fasilitas jamban, fasilitas pembuangan kotoran. Gambaran sosial daerah kumuh tidak baik. Mereka adalah bagian masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. Kondisi ekonomi penduduk daerah kumuh sangat rendah. Secara umum, penduduk daerah kumuh terlibat dalam kegiatan ekonomi tingkat rendah seperti pemeliharaan kain, pembersihan rumah, pekerja, pengemudi mobil, penarik thela, penarik becak dll. Penduduk daerah kumuh pada dasarnya buta huruf dan mereka tidak membaca dan menulis. Karena kurangnya kemampuan baca tulis, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan demikian kondisi ekonomi penduduk daerah kumuh tidak baik dan mereka menghasilkan lebih sedikit uang. Karena pendapatan yang kurang, penghuni kawasan kumuh tidak dapat membeli kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Status sosial ekonomi penduduk daerah kumuh dapat dikategorikan sebagai kelompok berpenghasilan rendah dengan pendidikan yang tidak memadai. (Nath Singh, 2016)

Pawar, DH & Mane, VD (2013, hlm. 69-72) dalam (Nath Singh, 2016) melakukan studi tentang kondisi sosial ekonomi penduduk daerah kumuh dan menyelidiki bahwa, status sosial ekonomi dihitung melalui eksplorasi dari pekerjaan, pendapatan, pengeluaran populasi. Pekerjaan memainkan peran penting dalam status sosial ekonomi. Hal tersebut mempengaruhi elemen-elemen lain seperti standar hidup populasi, status sosial-ekonomi populasi dan perkembangan dan kemajuan. Status sosial ekonomi tergantung pada standar hidup individu. Standar hidup juga tergantung

pada pendapatan keluarga. Ini bermanfaat untuk peningkatan kehidupan yang baik. Pekerjaan tergantung pada tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, fasilitas pekerjaan di pinggiran dan keterampilan mereka.

#### **D. Perencanaan Sosial dan Ekonomi Serta Model Pemberdayaan**

##### **Masyarakat Kawasan Kumuh**

Masalah sosial perencanaan pembangunan permukiman kota di negara berkembang seperti di Indonesia, dapat menyangkut berbagai macam persoalan. Beberapa persoalan itu misalnya jumlah penduduk atau ledakan penduduk, sementara di negara-negara maju yang menjadi permasalahan bukannya ledakan penduduk, melainkan justru menyusutnya penduduk karena orang di negara maju enggan hidup dengan kehidupan sosial yang mengikat, seperti mempunyai anak dan menikah. (Haryono, 2010)

Menurut (UN-Habitat, 2003) dalam menghadapi tantangan daerah kumuh, kebijakan pembangunan perkotaan harus lebih giat menangani masalah mata pencaharian penghuni daerah kumuh dan kemiskinan kota secara umum, sehingga melampaui pendekatan tradisional yang cenderung berkonsentrasi pada peningkatan perumahan, infrastruktur, dan kondisi lingkungan fisik. Perkampungan kumuh, sebagian besar, merupakan manifestasi fisik dan spasial dari kemiskinan perkotaan, dan kepentingan mendasar dari fakta ini tidak selalu diakui oleh kebijakan masa lalu yang ditujukan pada pemberantasan fisik atau peningkatan permukiman kumuh.

Kebijakan di masa depan harus melampaui dimensi fisik permukiman kumuh dengan mengatasi masalah yang mendasari kemiskinan kota. Kebijakan daerah kumuh harus berupaya mendukung mata pencaharian kaum miskin kota, dengan memungkinkan kegiatan sektor informal perkotaan berkembang, menghubungkan pembangunan perumahan berpenghasilan rendah dengan penghasil pendapatan, dan memastikan akses mudah ke pekerjaan melalui kebijakan transportasi yang berpihak pada penduduk miskin dan lokasi permukiman yang berpenghasilan rendah. (UN-Habitat, 2003)

Orang miskin dan penghuni daerah kumuh sering kali didefinisikan dari segi pendapatan. Dari perspektif ini, solusi untuk masalah kemiskinan dan permukiman kumuh akan muncul dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan penghuni permukiman kumuh. Memang, solusi semacam itu telah dicoba dalam skala besar di Amerika Serikat melalui program-program mahal dari New Deal dan War on Poverty, tetapi hanya program-program ini saja, menyebabkan ketergantungan yang semakin besar dari kaum miskin pada dana kesejahteraan publik, tanpa memiliki banyak keberhasilan dalam membantu mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri (D'souza, 1979)

Isu-isu sosial utama seperti gender, keamanan, wanita, disabilitas, dan pemuda pengangguran menarik pandangan sarjana sosial untuk melakukan studi mendalam. Bahkan memberdayakan individu berpartisipasi dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi serta

memperkuat kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan, mengkoordinasikan intervensi dalam perawatan kesehatan primer, kesetaraan gender, air dan sanitasi, pengendalian polusi, perumahan, menghasilkan pendapatan dan pendidikan adalah proyek-proyek yang paling penting yang harus dipertimbangkan. (Bagheri, 2013)

Diakui secara luas bahwa peningkatan pasokan air, infrastruktur, sanitasi, imunisasi yang lebih banyak, dan meningkatkan nutrisi masyarakat kumuh merupakan salah satu solusi di antara solusi lain yang akan secara dramatis mengurangi masalah kesehatan masyarakat. Karenanya ini adalah solusi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. (Bagheri, 2013)

Menurut (Cau, 2018), bahwa ada kemungkinan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga lainnya, seperti usia kepala rumah tangga, komposisi rumah tangga dan kekayaan / status keuangan rumah tangga, serta jenis perawatan yang diterima anak-anak dan remaja dalam rumah tangga, dapat mengubah efek dari tempat tinggal kumuh pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja.

Salah satu tujuan utama dari prinsip pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan cara-cara memastikan kehidupan yang berkualitas lebih baik untuk semua orang, sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Hal ini memerlukan proses dalam membangun masyarakat sehingga kita dapat hidup dengan nyaman dengan menyediakan mata pencaharian yang panjang dan aman yang meminimalkan penipisan sumber daya, degradasi

lingkungan, gangguan budaya dan ketidakstabilan sosial. (Ogunleye, 2013).

Pengentasan kemiskinan di kawasan kumuh perkotaan harus dimulai dengan proses pemberdayaan yang tepat guna dalam upaya membangun sumber daya (*asset capital*) pemukim sehingga akan mampu keluar dari kemiskinan. (Rahman Nugroho et al., 2017). Menurut Suryono (2010) dalam (Nugrahani et al., 2012), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strength*) kepada masyarakat. Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. (Rahmawati & Shamadiyah, 2017)

Dalam model pemberdayaan, Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan karena hakekatnya keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan

lingkungannya di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri. Sementara pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman demi terwujudnya keswadayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri, dan mendorong terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. (Suryani, 2012)

Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah harus ditempatkan sebagai subjek bukan objek dari permasalahan permukiman kumuh , sehingga cara pandang masyarakat harus digeser/diubah. Dengan cara ini masyarakat lebih dapat mengedepankan kehidupan dan lingkungannya. Masyarakat miskin termotivasi untuk dapat mandiri dan terdorong untuk dapat menolong diri sendiri serta mengelola lingkungan permukiman kumuh dengan baik. Pada akhirnya dengan partisipasi yang aktif masyarakat miskin bersama-sama memelihara lingkungan permukimannya. Maka kualitas permukiman masyarakat dapat meningkat serta lebih baik dan sehat, ini juga meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat. Masyarakat memiliki penghasilan rendah dapat berperan serta berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas permukiman serta



lingkungan dalam model pemberdayaan. Pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat pada permukiman kumuh dapat mengetahui standar kualitas lingkungan permukiman yang baik, terwujudnya kehidupan yang layak dan berkelanjutan dengan potensi yang dimiliki pada masyarakat yang tinggal pada permukiman kumuh tersebut. (Simbang et al., 2019)

Secara garis besar dalam pembangunan berkelanjutan ada beberapa aspek atau dimensi yang menjadi pertimbangan, diantaranya ekonomi terkait ekonomi lokal, lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat, pasar yang adil dan fair. Sedangkan aspek social terkait konsep berbasis komunitas, yaitu pembangunan adil sosial, demokratis terbuka, otonomi daerah dan lokal, peka keragaman budaya, peran serta dan pemberdayaan penduduk lokal. (Heston & Yusuf A, 2013)

Penguatan sosial dilakukan untuk dapat mencapai keterpaduan dan keberlanjutan peran dan kapasitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam penataan kawasan kumuh perkotaan. Keterpaduan dan keberlanjutan dilakukan dengan mengintegrasikan program dan mensinergikan kinerja antar pemangku peran. Peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan disemua fase baik Persiapan, Perancangan Program dan Implementasi program. (Heston & Yusuf A, 2013)

## E. Analisis *Cluster*

Analisis *cluster* adalah teknik eksplorasi tanpa asumsi struktur kelompok atau jumlah kelompok dan sering cukup membantu untuk menyelidiki sifat kompleks dari struktur sebuah data. Analisis dapat menafsirkan dan memvalidasi hasil analisis kluster berdasarkan pemahaman mereka tentang data. *Clustering* dapat dicapai dengan berbagai algoritma yang berbeda dalam gagasan mereka tentang apa yang merupakan sebuah *cluster* dan bagaimana cara efisien menemukan mereka. (Gupta, Guttman, & Jayalath, 2020)

Menurut (Papageorgiou, 2018) Analisis *Cluster* (CA) adalah metodologi statistik dalam bidang analisis statistik multivariat (lihat analisis multivariat) terutama digunakan untuk mengklasifikasikan seperangkat objek ke dalam kelompok berdasarkan beberapa pengukuran yang tersedia untuk setiap item. Kelompok yang dihasilkan, yang disebut *cluster*, dibangun sedemikian rupa sehingga benda-benda yang serupa, sehubungan dengan pengukuran mereka, termasuk dalam kelompok yang sama, dan benda-benda yang tidak sama.

Biasanya, analisis kluster diterapkan untuk sekumpulan objek yang heterogen atau berasal dari populasi yang berbeda, tetapi tidak ada informasi sebelumnya tentang jumlah kelompok atau keanggotaan objek yang tersedia. *Cluster* yang diturunkan idealnya menangkap heterogenitas yang ada, dan setiap *cluster* akan sesuai dengan subpopulasi. Jika

kumpulan data homogen, metodologi hanya akan menghasilkan satu kelompok. (Papageorgiou, 2018)

Dalam analisis *cluster*, tidak ada prediksi yang dibuat, karena teknik yang berbeda mengidentifikasi kesamaan antara pengamatan berdasarkan atribut yang dapat diamati dan mengelompokkan pengamatan yang memiliki kesamaan dalam satu kelompok. Di antara metode pengelompokan yang paling populer adalah algoritma k-means dan klasifikasi hierarkis. (Sedkaoui & Khelfaoui, 2020)

Kebutuhan untuk mengklasifikasikan pengamatan dataset menjadi kelompok sangat penting dan penggunaan Analisis *Cluster* dapat ditemukan di hampir setiap bidang ilmiah. *Clustering* dapat menjadi bagian dari analisis data eksplorasi, terutama dalam data dimensi tinggi atau sampel besar. Dalam kasus-kasus tersebut, jumlah kelompok yang diturunkan lebih kecil sehingga dapat (1) memfasilitasi meringkas informasi yang termuat, (2) memberikan deskripsi data di tingkat kelompok, dan (3) menemukan pola atau perbedaan di antara pengamatan. Dalam kasus lain, pengelompokan itu sendiri adalah tujuan akhir dari analisis. (Papageorgiou, 2018)

*Clustering* terdiri dari pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok homogen, yang disebut "*cluster*", sehingga elemen-elemen dari kelas yang sama adalah memiliki kemiripan atau serupa dan elemen-elemen yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda memiliki perbedaan. Oleh

karena itu perlu untuk menentukan ukuran kesamaan untuk dua titik data. (Sedkaoui & Khelfaoui, 2020)

Metode Hierarchical *clustering* berguna dalam membantu mengelompokkan sejumlah data tanpa menentukan jumlah *cluster*. Hierarchical *clustering* memungkinkan mengelompokkan objek ke dalam *cluster* sambil menentukan jumlah *cluster* yang efisien. Hal ini disebabkan pengelompokan dengan hierarchical *clustering* menggunakan pendekatan berulang berurutan (*sequencial iterative*) dalam membangun *cluster*. (Gupta et al., 2020)

## **F. Arahan Strategi Penanganan**

Penanganan Kawasan permukiman kumuh memerlukan langkah penanganan dan pencegahan yang tepat dan terarah serta efektif. Untuk itu penanganan dan pencegahan membutuhkan strategi dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga dapat efektif dan memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan definisi menurut David, Fred R, (2010), menyatakan bahwa: “Strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan organisasi. (Dwi Alko & Derriawan, 2019)

Barney dan Hesterly (2008), menjelaskan strategi sebagai sebuah teori tentang bagaimana cara perusahaan meraih keunggulan-keunggulan kompetitif (Competitive Advantages). Menurut Hitt (2011) dalam (Faruq & Usman, 2014), strategi merupakan sebuah rangkaian yang terpadu dan terkoordinasi dari komitmen dan tindakan yang dirancang untuk

mengeksplotasi kompetensi utama dan meraih keunggulan kompetitif. Strategi memberi jawaban bagi pihak manajemen mengenai bagaimana cara mencapai tujuan perusahaan dan bagaimana caranya untuk mencapai misi organisasi dan visi strategis.

Menurut Amirullah (2015) dalam (Sugianto & Hongdiyanto, 2017), menjelaskan bahwa strategi adalah suatu kesatuan rencana perusahaan yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Pearce dan Robinson dalam (Sugianto & Hongdiyanto, 2017), strategi adalah rencana manajer yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran perusahaan. Dalam hal ini bagaimana pemerintah dan masyarakat mampu untuk mencegah dan menangani permasalahan permukiman kumuh yang terbentuk pada suatu Kawasan.

Salah satu metode dalam menyusun strategi manajemen adalah analisis SWOT. Kottler dan Keller (2006) dalam (Shamadiyah, 2017) menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT terdiri atas lingkungan pemasaran internal dan eksternal.

Menurut Freddy Rangkuti (2008) dalam (Rahmawati, 2018) menjelaskan bahwa SWOT adalah identitas berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan

dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths),kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. (Rahmawati, 2018)

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kawasan kumuh telah banyak dilaksanakan. Imas Hartini (2019) melakukan penelitian tentang bagaimana menyusun pola penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan tipologi kondisi lingkungan dan ketersediaan sarana prasarana dan sumberdaya alam merupakan suatu prasyarat bagi keberlanjutan kehidupan

permukiman. Retno Wijayanti (2019) mencoba untuk Menganalisis pola sebaran spasial permukiman kumuh di Kota Bekasi, kemudian menganalisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan Zona Nilai Tanah (ZNT) terhadap permukiman kumuh di Kota Bekasi. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi, serta Menyusun arahan rekomendasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi.

Menurut Gusmaini (2010) Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk secara alami serta proses urbanisasi. Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di daerah perkotaan menyebabkan semakin berkembangnya rumah petak kecil yang diperjualbelikan dan disewakan kepada para pendatang. Rumah-rumah petak kecil tersebut kemudian berkembang menjadi kawasan padat dan kumuh yang disebut dengan kawasan kumuh (slum area). Sedangkan menurut Shaibatul Islamiah (2015) Peningkatan jumlah permukiman yang tidak diikuti oleh peningkatan luas kawasan yang dapat menyebabkan menurunnya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di permukiman tersebut.

Amos Setiadi (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Tingkat taraf kehidupan masyarakat mengalami penurunan kualitas baik tingkat lingkungan dan pendapatan serta tumbuhnya permukiman kumuh. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi beberapa aspek, yaitu aspek fisik,

sosial, budaya dan ekonomi. Sehingga Penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi strategis ketika kawasan itu terintegrasi dengan bagian-bagian kota seperti kawasan pusat kota, kawasan pusat pertumbuhan kota, maupun kawasan-kawasan lain di sekitarnya, misalnya kawasan industri, perdagangan, pergudangan, dan perkantoran

Penelitian mengenai strategi penanganan Kawasan kumuh berdasarkan karakteristik sosial ekonomi berasal dari permasalahan mengenai masih kurangnya kebijakan penanganan Kawasan kumuh dengan pendekatan sosial ekonomi yang ada selama ini. Penelitian tentang Kawasan kumuh di Kecamatan Bantaeng Sulawesi Selatan ini mencoba melihat bagaimana gambaran *cluster* permukiman kumuh jika berdasarkan karakteristik sosial ekonomi yang ada. Kemudian menentukan strategi yang tepat berdasarkan dengan hasil identifikasi karakteristik dan *cluster* sosial ekonomi masyarakat pada daerah penelitian. Pendekatan strategi penanganan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi diharapkan mampu menjadi solusi alternatif yang selama ini hanya menitikberatkan pada penanganan fisik lingkungan permukiman kumuh. Hal terbaru dalam penelitian kami adalah bagaimana mengelompokkan karakteristik sosial ekonomi masing-masing kawasan ke dalam klaster dengan melihat kemiripan karakteristik yang ada. Dan kemudian membuat strategi penanganan berdasarkan klaster yang telah terbentuk dengan menggunakan analisis *SWOT*.



Untuk melihat secara jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Peneliti Terdahulu

Peneliti & Publikasi	Judul	Tujuan	Metode	Output
Imas Hartini (Thesis, IPB, 2019)	Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bandung Barat	untuk menyusun pola penanganan permukiman kumuh berdasarkan tipologi permukiman kumuh Kecamatan Cibinong	Metode Spasial deskriptif dan Metode Analisis Kuantitatif dengan AHP	Terdapat 3 tipologi pada Kawasan kumuh di Kecamatan Cibinong dengan tingkat keberlanjutan tinggi dan sedang pada tipologi 1 dan tingkat keberlanjutan rendah pada tipologi 2 dan 3
Retno Wijayanti (Thesis, IPB, 2019)	Identifikasi Pola Sebaran Spasial Permukiman Kumuh dan Arahannya di Kota Bekasi	Menganalisis Pola sebaran, hubungan tingkat perkembangan wilayah, factor-faktor yang mempengaruhi dan arahan penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bekasi	Metode Identifikasi Spasial dan Analisis Dekriptif Kuantitatif	Terjadinya pergeseran sebaran permukiman kumuh menuju arah selatan kota, dan perubahan pola sebaran permukiman kumuh dari <i>cluster</i> menjadi random
Gusmaini (Thesis, IPB, 2010)	Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)	untuk mengidentifikasi kawasan, mempelajari karakteristik, mengetahui faktor penciri dan mempelajari mobilitas masyarakat di permukiman kumuh.	Metode Analisis Kuantifikasi	Permukiman Kumuh banyak dijumpai di sekitar sungai dan jalan tol, dengan factor yang mempengaruhi yakni jumlah kegiatan, Pendidikan, dan sarana transportasi
Shaibatul Islamiah (Thesis, IPB, 2015)	Evaluasi Lanskap Permukiman padat Kelurahan Babakan Pasar sebagai Upaya Pendukung Revitalisasi Kawasan CBD Kecamatan Bogor Tengah	untuk menginventarisasi dan menganalisis kriteria revitalisasi lanskap permukiman padat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2010	Metode Kualitatif, dengan survey, wawancara dan Kuisisioner	lanskap permukiman padat penduduk ini termasuk dalam kategori cukup potensial untuk dilakukan kegiatan revitalisasi dan potensi <i>vitality</i> ekonomi dan evaluasi menunjukkan bahwa kualitas permukiman, jaringan jalan, drainase, persampahan belum sesuai dengan standard.
Amos Setiadi (Jurnal Tata Loka, Volume 16, Hal 221-233, 2014)	Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang	Untuk Melakukan Identifikasi dan Pola Penanganan Pada Kawasan Kumuh yang terdapat pada Kota Bontang	Metode Kualitatif berdasarkan Kuisisioner	Pola penanganan permukiman kumuh sesuai dengan pola sesuai karakter lokasi, mencakup lokasi dengan kategori Permukiman kumuh tinggi (KT) dilakukan pola penanganan kuratif (penanggulangan), lokasi

				dengan kategori Permukiman kumuh sedang (KS) dilakukan pola penanganan reduktif, dan lokasi dengan kategori Permukiman kumuh rendah (KR) dilakukan pola penanganan preventif (pencegahan)
Raisya Nursyahbani dan Bitta Pigawati (Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Volume 4, Hal267-281, 2015)	Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang) Raisya	untuk mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh yang terdapat di Kampung Gandekan Semarang beserta tingkat kekumuhannya	jenis penelitian kuantitatif deskriptif.	karakteristik pemukiman kumuh yang terdapat di Kampung Gandekan ini, dari karakteristik penghuninya adalah merupakan warga campuran antara pribumi dengan etnis Tionghoa yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan ekonomi yang masih rendah, dari karakteristik huniannya sebagian besar masih tergolong jenis hunian yang belum layak huni, dari karakteristik sarana prasarana terutama untuk kepentingan privat masih belum memadai sedangkan dari karakteristik lingkungannya diketahui bahwa kondisi lingkungan didalamnya cenderung tidak teratur dan masih belum memenuhi standar kebutuhan pemukiman seperti tidak adanya keberadaan ruang terbuka hijau maupun non hijau yang dapat digunakan untuk kegiatan aktifitas bersama.
Yudha P. Heston dan Ahmad Yusuf (Jurnal Tataloka, Volume 15, Hal 208, 2013)	Penguatan Kemampuan Sosial Pada Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (Studi Kasus Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi)	untuk mengukur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menguatkan kemampuan sosial, baik bagi pemerintah maupun masyarakat pada penataan kawasan kumuh perkotaan dengan mengambil studi kasus di kelurahan Cigugur Tengah kota Cimahi.	Metode penelitian yang dilakukan adalah Participatory Research Appraisal (PRA)	keberhasilan penguatan sosial pada penataan daerah kumuh perkotaan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas governansi pemerintah dan komunitas masyarakat. Peningkatan kapasitas governansi pemerintah dapat dilakukan dengan mendorong Pimpinan Daerah, memberikan komitmen untuk menetapkan Kawasan Prioritas dalam peningkatan kualitas sosial wilayah.
Abi Syarwan Wimarjana, dan Rulli Pratiwi Setiawan (Jurnal Teknik ITS, Volume 5, Hal 116, 2016)	Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin	menentukan faktor prioritas penyebab kumuh, dengan melakukan pencapaian tahapan sasaran yaitu mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh, serta menganalisis dalam menentukan	analisis statistik deskriptif, analisa stakeholder dan teknik analisis AHP (Analytical Hierarchy Process)	karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Hampir keseluruhan bangunan berdiri berada pada lahan berkarakteristik gambut yang memiliki kadar air cukup besar. Selain itu, terdapat 4 indikator penyebab prioritas penyebab kumuh. yaitu (1) Kondisi Fisik Bangunan (2) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (3) Kondisi Sarana dan Prasarana (4) Pengendalian Hukum.

		faktor prioritas penyebab kumuh permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.		
--	--	---	--	--

## H. Kerangka Konseptual

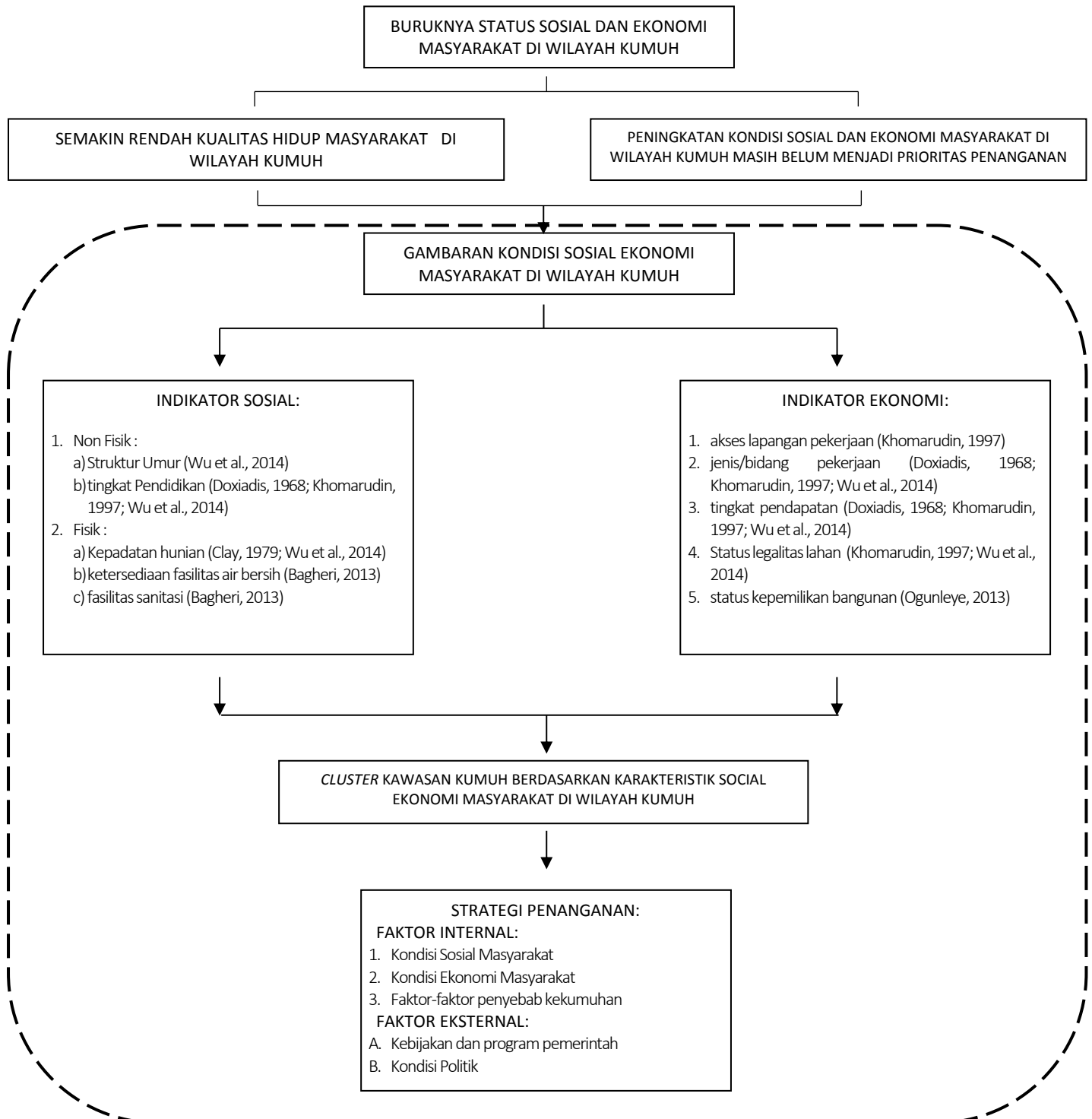
Konsep penanganan kawasan kumuh hingga saat ini masih dalam bentuk fisik. Lestari (2013) menjelaskan bahwa munculnya permukiman kumuh tersebut karena faktor rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin. Penanganan Kawasan kumuh perlu untuk menimbang pentingnya kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat kumuh tersebut.

Menurut UN-HABITAT (2003) dalam menghadapi tantangan daerah kumuh, kebijakan pembangunan perkotaan harus lebih giat menangani masalah mata pencaharian penghuni daerah kumuh dan kemiskinan kota secara umum, sehingga melampaui pendekatan tradisional yang cenderung berkonsentrasi pada peningkatan perumahan, infrastruktur, dan kondisi lingkungan fisik.

Perbedaan kondisi sosial ekonomi pada setiap Kawasan juga dapat di bedakan berdasarkan *cluster* tingkat kondisi sosial ekonomi masyarakat pada wilayah kumuh. Sehingga memudahkan dalam memberikan gambaran tentang kondisi pada wilayah tersebut dan memudahkan dalam pengambilan keputusan penanganan dengan pendekatan karakteristik sosial ekonomi masyarakat kumuh. Sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi serta memberikan

strategi penangan Kawasan kumuh dengan pendekatan karakteristik sosial ekonomi masyarakat kumuh.

Adapun kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Keterangan:  Ruang lingkup penelitian